

Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pendidikan: Urgensi, Tantangan, Dan Strategi Penguatannya

Aril Deo Saputra¹, Muhammad Bahrul Musthofa², Anisah Najwa Mumtaza³,
Qoidatul Ghurriel Muhajjal⁴

^{1,2,3,4}Department of Islamic Educational Management, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Malang, Indonesia

Email: arildeosaputra@gmail.com

Article History

Accepted: 18-06-2026

Revised: 13-07-2026

Received: 31-08-2026

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta mengkaji strategi penguatannya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung terciptanya kebijakan pendidikan yang lebih demokratis. Namun, partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan informasi, kondisi sosial ekonomi, dan lemahnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan transparansi, optimalisasi peran komite sekolah, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kata Kunci

partisipasi masyarakat, kebijakan pendidikan, mutu pendidikan, tantangan, strategi penguatan.

Abstract

Community participation is an important factor in supporting the success of educational policies. This article aims to analyze the urgency of community participation in educational policy, identify the challenges encountered, and examine strategies for strengthening such participation. This study employs a library research method with a descriptive qualitative approach through the analysis of relevant literature sources. The findings indicate that community participation plays a significant role in improving educational quality, strengthening accountability, and supporting the development of more democratic educational policies. However, community participation still faces several challenges, including low public awareness, limited access to information, socio-economic constraints, and weak communication between schools and communities. Therefore, efforts to

strengthen community participation are needed through increased transparency, optimization of school committee roles, community empowerment, the utilization of digital technology, and collaboration among government, schools, families, and communities to achieve quality and sustainable education.

Keywords community participation, educational policy, educational quality, challenges, strengthening strategies.

Please cite this article in APA style as:

Saputra, A. D., Musthofa, M. B., Mumtaza, A. N., & Muhajjalín, Q. G. (2026). *Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan: Urgensi, tantangan, dan strategi penguatannya. Islah Tarbawi: Journal of Islamic Education and Learning*, 2(2), 84-93.



This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam atau perkembangan teknologi, tetapi juga oleh kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakatnya (Dihe & Wangdra, 2023). Oleh karena itu, berbagai kebijakan pendidikan terus dirumuskan dan dikembangkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mampu menghasilkan generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi.

Dalam implementasinya, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat. Masyarakat memiliki posisi yang strategis karena menjadi bagian yang secara langsung merasakan dampak dari setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan (Panoyo, 2024). Oleh sebab itu, masyarakat tidak dapat diposisikan hanya sebagai penerima manfaat pendidikan, melainkan sebagai mitra yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan pendidikan yang demokratis. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian saran dan masukan terhadap kebijakan pendidikan, dukungan moral dan material, pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan, hingga keterlibatan dalam proses evaluasi kebijakan. Analisna et al., (2024) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan program, tetapi juga mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program pendidikan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial yang berkembang.

Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan mutu pendidikan. Penelitian Chandrakirana et al., (2021) menemukan bahwa keterlibatan masyarakat mampu menciptakan dukungan sosial yang positif

terhadap penyelenggaraan pendidikan sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat akuntabilitas lembaga pendidikan melalui fungsi pengawasan dan kontrol sosial yang dilakukan secara bersama-sama.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pendidikan, keterbatasan akses informasi, lemahnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat, serta faktor sosial ekonomi sering kali menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Kebunbun, 2025). Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan dan cenderung menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan kepada pemerintah maupun sekolah. Padahal, keberhasilan pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan menjadi penting untuk dilakukan. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, bentuk, peran, tantangan, dan strategi penguatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kebijakan pendidikan yang lebih demokratis, responsif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan, mengkaji bentuk dan perannya dalam penyelenggaraan pendidikan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, serta menguraikan berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.

METODE

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Menurut Mestika Zed (2018) penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai sumber utama data penelitian. Sementara itu, Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam melalui analisis data yang bersifat deskriptif dan interpretatif.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengelompokkan berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu urgensi, tantangan, dan strategi penguatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, data disusun dan diinterpretasikan secara sistematis sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif mengenai

partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan serta upaya penguatannya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian yang relevan, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam implementasinya, partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu urgensi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat guna mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Saat ini partisipasi masyarakat dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkualitas. Perkembangan paradigma pendidikan modern menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam mendukung proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hasil analisis berbagai literatur menunjukkan bahwa urgensi partisipasi masyarakat dapat dilihat dari perannya dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang demokratis. Kholik & Fadriati (2023) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memungkinkan terjadinya sinergi antara sekolah dan lingkungan sosial sehingga kebijakan pendidikan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terhadap berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan sosial masyarakat.

Selain mendukung demokratisasi pendidikan, partisipasi masyarakat juga berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Chandrakirana et al., (2021) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat mampu memperkuat hubungan antara sekolah dan lingkungan sekitar sehingga tercipta dukungan sosial yang positif terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan sarana dan prasarana, dukungan moral, keterlibatan dalam program sekolah, maupun kontribusi pemikiran dalam proses pengambilan keputusan. Semakin

tinggi tingkat keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*). Mulyasa (2022) menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah menempatkan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan yang berperan dalam mendukung efektivitas pengelolaan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program pendidikan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sagala (2020) menegaskan bahwa kemitraan antara sekolah dan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang efektif dan berorientasi pada peningkatan mutu.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga memiliki fungsi sebagai modal sosial (*social capital*) dalam pembangunan pendidikan. Kepercayaan, kerja sama, dan kepedulian masyarakat terhadap sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan berbagai program pendidikan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan terhadap sekolah, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kebijakan pendidikan. Berdasarkan sintesis berbagai literatur tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam kebijakan pendidikan karena berperan dalam memperkuat demokratisasi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat akuntabilitas publik, dan membangun kemitraan yang berkelanjutan antara sekolah dan masyarakat.

Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Meskipun partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan, baik yang berasal dari faktor internal masyarakat maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pendidikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pendidikan. Suryana et al., (2022) menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah dan sekolah semata sehingga keterlibatan mereka dalam berbagai program pendidikan masih relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat cenderung bersifat pasif dan hanya terlibat ketika terdapat kebutuhan tertentu tanpa berpartisipasi secara berkelanjutan dalam proses pendidikan.

Selain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Informasi mengenai program sekolah, kebijakan pendidikan, maupun peluang partisipasi sering kali belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui ruang partisipasi yang tersedia dan mengalami kesulitan dalam menentukan bentuk kontribusi yang dapat diberikan. Aryanda (2024) menjelaskan bahwa kurangnya keterbukaan informasi dan rendahnya akses masyarakat terhadap proses kebijakan dapat menghambat terbentuknya partisipasi publik yang efektif.

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah juga dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memahami berbagai kebijakan pendidikan yang bersifat teknis. Tantangan lainnya adalah lemahnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Komunikasi yang kurang efektif dapat menyebabkan munculnya kesalahpahaman, rendahnya kepercayaan, serta terbatasnya kerja sama antara kedua belah pihak. Dalam berbagai kajian, komunikasi yang tidak berjalan secara terbuka sering kali menjadi penyebab rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program-program pendidikan.

Di era digital, tantangan baru yang muncul adalah kesenjangan digital (*digital divide*). Meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi pendidikan, tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Akibatnya, sebagian masyarakat masih mengalami hambatan dalam memperoleh informasi pendidikan dan berpartisipasi dalam berbagai forum pendidikan berbasis digital. Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan tidak hanya berasal dari faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sosial ekonomi, komunikasi, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan. Penguatan partisipasi masyarakat tidak hanya bertujuan meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, tetapi juga memperkuat kualitas kontribusi yang diberikan dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah strategi yang mampu mendorong terciptanya hubungan yang sinergis antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

a. Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Pendidikan

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Transparansi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan karena masyarakat dapat mengetahui secara jelas berbagai program, kebijakan, serta penggunaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Sekolah perlu menyediakan informasi yang terbuka mengenai program kerja, penggunaan anggaran, capaian pendidikan, serta berbagai kebijakan yang sedang dijalankan. Menurut Mulyasa (2022) transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam manajemen berbasis sekolah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Keterbukaan informasi juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif terhadap program pendidikan yang

dilaksanakan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan kemitraan antara sekolah dan masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan (Mulyasa, 2022; Sagala, 2020).

b. Memperkuat Komunikasi antara Sekolah dan Masyarakat

Strategi berikutnya adalah memperkuat komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Komunikasi yang efektif menjadi sarana penting dalam membangun hubungan yang harmonis serta menciptakan kerja sama yang produktif antara kedua belah pihak. Prabandari et al., (2021) menjelaskan bahwa komunikasi yang baik dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui berbagai forum komunikasi, pertemuan rutin, konsultasi publik, serta pemanfaatan media digital. Melalui komunikasi yang terbuka, sekolah dapat menyampaikan informasi terkait program dan kebutuhan pendidikan, sementara masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta harapannya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, komunikasi yang intensif dapat meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses agar partisipasi masyarakat dapat berlangsung secara lebih aktif dan berkelanjutan.

c. Mengoptimalkan Peran Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan lembaga yang dibentuk untuk mewadahi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, komite sekolah memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator (*mediating agency*) antara sekolah dengan masyarakat. Fungsi tersebut menjadikan komite sekolah sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang partisipatif. Suryana et al., (2022) menjelaskan bahwa keberadaan komite sekolah dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas komite sekolah perlu dilakukan agar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

d. Memberdayakan Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan

Partisipasi masyarakat yang berkualitas memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan menjadi strategi yang penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat di bidang pendidikan. Mahardhani (2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kegiatan seperti sosialisasi, seminar, pelatihan, lokakarya, dan forum diskusi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan serta peran mereka dalam mendukung kebijakan pendidikan. Melalui proses pemberdayaan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mampu berperan sebagai mitra aktif dalam pembangunan pendidikan (Kholik & Fadriati, 2023).

e. Pemanfaatan Teknologi Digital sebagai Sarana Partisipasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Penggunaan media sosial, website

sekolah, aplikasi pendidikan, dan platform komunikasi digital dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi serta menyampaikan aspirasi terkait penyelenggaraan pendidikan. Prabandari et al., (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan media digital mampu meningkatkan efektivitas komunikasi antara sekolah dan masyarakat karena informasi dapat disampaikan secara lebih cepat dan luas. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah tanpa harus hadir secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperluas ruang partisipasi masyarakat.

f. Membangun Kolaborasi Multipihak

Selain itu, Nelly (2024) menegaskan bahwa penguatan partisipasi masyarakat perlu didukung oleh kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, sekolah, masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut memungkinkan terjadinya sinergi sumber daya dan penguatan kapasitas masyarakat dalam mendukung pembangunan pendidikan. Melalui kerja sama yang kuat, partisipasi masyarakat dapat berkembang dari sekadar keterlibatan formal menjadi keterlibatan yang substantif dalam proses pengambilan keputusan pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur, dapat dipahami bahwa penguatan partisipasi masyarakat harus dilakukan melalui peningkatan transparansi, penguatan komunikasi, optimalisasi peran komite sekolah, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan kolaborasi multipihak. Strategi-strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat sehingga kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, demokratis, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat memiliki urgensi yang sangat penting dalam kebijakan pendidikan karena berperan dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat tidak hanya membantu pemerintah dan sekolah dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan sumber daya, pengawasan, serta penguatan hubungan antara sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pendidikan, keterbatasan akses informasi, kondisi sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta lemahnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat menjadi hambatan yang memengaruhi kualitas dan intensitas partisipasi masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru berupa kesenjangan digital yang menyebabkan tidak semua masyarakat dapat terlibat secara optimal dalam berbagai proses pendidikan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan transparansi pengelolaan pendidikan, penguatan komunikasi antara sekolah dan masyarakat, optimalisasi peran komite

sekolah, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan. Melalui sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan, partisipasi masyarakat diharapkan mampu menjadi kekuatan utama dalam mendukung terwujudnya kebijakan pendidikan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisa, Sulistiani, M. Y. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. *Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 01(01), 1–12. <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/alamiyah>
- Aryanda, D. F. (2024). Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Mengawal Kebijakan Pendidikan Kota Malang. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(2), 65. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i2.1932>
- Chandrakirana, A., Almawardy, & Sari, W. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di MI Pesantren Modern Bone Macope. *Jurnal Mappesona*, 4(3), 107–114.
- Dihe, L., & Wangdra, Y. (2023). Pendidikan Adalah Faktor Penentu Daya Saing Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, September*, 84–90. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- Januar Mahardhani, A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal Berkarakter Cinta Tanah Air. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 56–63. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n2.2018.pp56-63>
- Kebunbun, R. J. M. (2025). Analisis Faktor-Faktor Penurunan Angka Partisipasi Sekolah di Daerah Terpencil di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 425–441. <https://indojurnal.com/index.php/jisoh/article/view/408>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Method Sources Book* (3rd ed.). Sage Publication.
- Muhammad Habib Ilham Kholik & Fadriati. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pendidikan Di Pesantren MODERN. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 4(3), 340–348. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/nusra.v4i3.1019>
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen Berbasis Sekolah* (3rd ed.). Universitas Terbuka.
- Nelly, S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86–94. <https://fisipolupgriplk.ac.id/jurnal/index.php/JSP/article/view/119>
- Panoyo. (2024). Pendidikan sebagai Pilar Pembangunan Bangsa Indonesia Menuju Masa Depan Berkelanjutan. *Jurnal Studi Pendidikan Dan Pengembangan (JSPED)*, 2(66), 34.
- Prabandari, D. A., Supriyanto, A., Sobri, A. Y., & Fadhli, R. (2021). Strategi Humas Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sekolah Public Relations Strategy to Increase Community Participation in School Programs. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 179–191.
- Sagala, S. (2020). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Suryana, N., Mumuh, M., & Hilman, C. (2022). Konsep Dasar dan Teori Partisipasi Pendidikan. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 61–67. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.219>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. UU No. 20 Tahun 2003. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.